

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
(DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)

A. Informasi Berkala

NO	NAMA DOKUMEN	RINGKASAN INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA (Softcopy/ Hardcopy)	JangkaWaktu Penyimpanan	Link Dokumen
1.	DPA	Dokumen perencanaan anggaran Tahun 2023 yang terdiri dari kegiatan : 1. Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7. Administrasi kepegawaian perangkat daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Subbagian Umum	OPD(Benteng, 04 Januari 2023)	(Softcopy / Hardcopy)	Selama Berlaku Hingga 3 Tahun Setelah masa berlaku habis	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1d6dI8u9-hS_2ZZH5PuRV0Xx8KneHFIPS?hl=id

		Daerah 9. Penyelenggara promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota 10. Penetapan Pemberian Fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/ kota 11. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 12. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi 13. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					
2.	DPA-P	Dokumen perencanaan anggaran Tahun 2023 yang terdiri dari kegiatan : 1. Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Administrasi Barang Milik Daerah	Subbagian Umum	OPD(Benteng, 03 Oktober 2023)	(Softcopy / Hardcopy)	Selama Berlaku Hingga 3 Tahun Setelah masa berlaku habis	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1HG7fGfwFvYVAWUVaQJIRzN-RrQvIxwu?hl=id



		<p>pada Perangkat Daerah</p> <p>7. Administrasi kepegawaian perangkat daerah</p> <p>8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>9. Penyelenggraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota</p> <p>10. Penetapan Pemberian Fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/ kota</p> <p>11. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>12. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi</p> <p>13. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</p>					
3.	LAKIP	<p>Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2023 di buat di tahun 2024 sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun</p>	Subbagian Umum	OPD (Benteng, 23 Januari 2024)	(Softcopy / Hardcopy)	Selama Berlaku Hingga 3 Tahun Setelah masa berlaku habis	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1T1-1qnPdJJ7wYM-2qFLdUA8wOX8Asqje?hl=id



4.	Casecading	Casecading Tahun 2023 Penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan target IKU.	Subbagian Umum	OPD(Benteng Januari 2023)	(Softcopy / Hardcopy)	Selama Berlaku Hingga 3 Tahun Setelah masa berlaku habis	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1OTpCJvPKhkZvosZn6FkAZgy2F18edJSX?hl=id
5.	LKPJ	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023 Dibuat di tahun 2024 yang Menggambarkan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran	Subbagian Umum	OPD (Benteng, 19 Januari 2024)	(Softcopy / Hardcopy)	Selama Berlaku Hingga 3 Tahun Setelah masa berlaku habis	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1QcZTKEYLhg9YTViBmz6W7otTShqfiRaC?hl=id
6.	Perjanjian Kinerja (Perjakin)	Perjanjian Kinerja (Perjakin) tahun 2023 1. Wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; 2. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 3. Dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai	Subbagian Umum	OPD (Benteng, 03 Februari 2023)	(Softcopy / Hardcopy)	Selama Berlaku Hingga 3 Tahun Setelah masa berlaku habis	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1iM4QLa8Tmpt1La-Y6u9gl4vAbg8ejVD1?hl=id
7.	RFK	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2023 yang berisi realisasi pendapatan, belanja, trnsfer, pembiayaan	Subbagian Umum	OPD (Benteng, 31 Januari 2023)	(Softcopy / Hardcopy)	Selama Berlaku Hingga 3 Tahun Setelah masa	https://drive.google.com/drive/u/3/folders



		dan sisa lebih/kurangnya pembiayaan anggaran di setiap kegiatan.				berlaku habis	/1RQ4Pqk7T0NEZVNepSXf3Kr0tG4ptf8?hl=id
8.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Acuan untuk mengukur capaian kinerja yang telah direncanakan baik dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja (Renja) Tahunan serta Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah	Subbagian Umum	OPD (Benteng, Januari 2023)	(Softcopy / Hardcopy)	Selama Berlaku Hingga 3 Tahun Setelah masa berlaku habis	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1f9bynD7IXqpALG-SbqznHcwn2369w2tG?hl=id
9.	Laporan evaluasi internal	Laporan evaluasi internal, laporan ini terdiri dari 4 lapoorn yaitu laporan Triwulan I s/d Triwulan IV, laporan ini berisi tentang anggaran dan capaian pelaksanaan kegiatan pertriwulan	Subbagian Umum	OPD (Benteng, Januari – Desember 2023)	(Softcopy / Hardcopy)	Selama Berlaku Hingga 3 Tahun Setelah masa berlaku habis	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1rUCSdTIKiWSLXFijG5MSI7QR8wNy1ug?hl=id
10.	Laporan Evaluasi Rencana Aksi	Dokumen Laporan Realisasi Rencana Aksi Capaian Kinerja Triwulan IV Dinas PMPTSP Tahun 2023 disusun sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan/kegagalan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.	Subbagian Umum	OPD (Benteng, desemeber 2023)	(Softcopy / Hardcopy)	Selama Berlaku Hingga 3 Tahun Setelah masa berlaku habis	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1aEzNcabGA-2rF4nCZmcW3vVyCi0d1w9d?hl=id
11.	Renja	Renja Perangkat Daerah di samping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan	Subbagian Umum	OPD(Benteng, 2023)	(Softcopy/ Hardcopy)	Selama Berlaku hingga 3 Tahun Setelah Masa	https://drive.google.com/drive/u/3/folders



		visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada OPD				Berlaku Habis	/1cPtMtl11I1SGhcb1BsiwB7GcC6LeHTpF?hl=id
12.	Standar pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko	Standar pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko merupakan alat ukur yang digunakan untuk pelayanan.	Bidang perizinan	OPD(Benteng, 2023)	(Softcopy/ Hardcopy)	Selama Berlaku hingga 3 Tahun Setelah Masa Berlaku Habis	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1cGrWs1zrIJhKvKPhzaZUju a1r3q6i0G7?hl=id
13.	Standar operasional prosedur pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko	Standar operasional prosedur pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko	Bidang perizinan	OPD(Benteng, 2023)	(Softcopy/ Hardcopy)	Selama Berlaku hingga 3 Tahun Setelah Masa Berlaku Habis	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1cGrWs1zrIJhKvKPhzaZUju a1r3q6i0G7?hl=id
	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar	Pembentukan Tim Pelaksana kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal pada Dinas PMPTSP Tahun Anggaran 2023	Bidang Penanaman Modal	OPD(Benteng, 23 Juni 2023)	(Softcopy/ Hardcopy)	Selama Berlaku hingga 3 Tahun Setelah Masa Berlaku Habis	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-VYmTC1XfXZSSgKyBPHFJKNfEEGdL31d
14.	Keputusan Kepala Dinas PMPTSP	Pembentukan tim pengawas kegiatan studi kelayakan project investasi pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar Tahun	Bidang Penanaman Modal	OPD(Benteng, 24 Januari 2023)	(Softcopy/ Hardcopy)	Selama Berlaku hingga 3 Tahun Setelah Masa	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-



		Anggaran 2023				Berlaku Habis	VYmTC1XfXZSSgKyBPHFJKNfEEGdL31d
15.	Keputusan Kepala Dinas PMPTSP	Pembentukan tim persiapan kegiatan studi kelayakan project investasi pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023	Bidang Penanaman Modal	OPD(Benteng, 24 Januari 2023)	(Softcopy/ Hardcopy)	Selama Berlaku hingga 3 Tahun Setelah Masa Berlaku Habis	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-VYmTC1XfXZSSgKyBPHFJKNfEEGdL31d
16.	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar	Pembentukan Tim Pelaksana kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal pada Dinas PMPTSP Tahun Anggaran 2023	Bidang Penanaman Modal	OPD(Benteng, 23 Juni 2023)	(Softcopy/ Hardcopy)	Selama Berlaku hingga 3 Tahun Setelah Masa Berlaku Habis	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-VYmTC1XfXZSSgKyBPHFJKNfEEGdL31d

B. INFORMASI SERTA MERTA

NO	NAMA DOKUMEN	RINGKASAN INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA (Softcopy/ Hardcopy)	Jangka Waktu Penyimpanan	Link Dokumen
1.							
2.							
3.							
Dst*							

C. Informasi Setiap Saat

NO	NAMA DOKUMEN	RINGKASAN INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA (Softcopy/ Hardcopy)	Jangka Waktu Penyimpanan	Link Dokumen
1.	Renstra	Pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan Acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah	Subbagian Umum	OPD(Benteng, 2023)	(Softcopy/ Hardcopy)	Selama Berlaku hingga 5 Tahun Setelah Masa Berlaku Habis	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1-EfgbqgET3ZVe15chAUPgJ3tvy_kWf7P?hl=id
2.	SK PPID	KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 37 / III /TAHUN 2023 TENTANG,PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	Subbagian Umum	OPD(Benteng, 2024)	(Softcopy/ Hardcopy)	Selama Berlaku hingga 5 Tahun Setelah Masa Berlaku Habis	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/12r82G7avQMVfFrFMkOLOTc7K_Ujo86Oa?hl=id

3.	Daftar Usaha Ber NIB	Daftar usaha yang mempunyai NIB dapat dikatakan Legal karena memiliki Nib, Tanggal penerbitan, Nama perusahaan, Status Penanaman Modal, Uraian Jenis Perusahaan, Alamat Perusahaan, Kab Kota Email, nomor_telp	Bidang Pelayanan Perizinan	OPD(Benteng, Desember 2023)	(Softcopy/ Hardcopy)	Selama Berlaku Selama Pelaku Usaha Masih Menjalankan Usaha	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Om67RkKqVSL4ebDcM7x_XNSRN0Vnum3g?hl=id
Dst*							

Benteng, 14 Maret 2024
Kepala Dinas PMPTSP



^

Drs. H. ANDI NUR HALIQ. M.Si
Nip: 19660507 198603 1 022

Keterangan :

- a. Informasi Berkala (Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik/ pasal 14,15,dan 16 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik)
- b. Informasi Serta Merta (Pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik/ pasal ,19 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik)
- c. Informasi Setiap Saat (Pasal 11 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik/ pasal ,21 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik)
- Dst : jika kolom tidak cukup silahkan ditambahkan
- Tabel diisi dengan nama seluruh dokumen yang dihasilkan, dikirim, diterima dan disimpan oleh Organisasi Perangkat Daerah peserta Bimtek.